



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

6 April 2026

POLITIK INFRASTRUKTUR DAN IMAJINASI TENTANG INDONESIA MASA DEPAN

Abstrak

Makalah ini membahas infrastruktur bukan semata-mata sebagai kumpulan jalan, bendungan, pelabuhan, jaringan listrik, dan serat optik, melainkan sebagai arena politik yang membentuk cara bangsa membayangkan masa depannya. Argumen utama makalah ini adalah bahwa infrastruktur di Indonesia selalu bekerja dalam dua lapis sekaligus: lapis material yang menghubungkan orang, barang, energi, data, dan wilayah; serta lapis simbolik yang memproduksi janji tentang modernitas, pemerataan, kedaulatan, dan Indonesia Emas 2045. Dalam konteks itu, politik infrastruktur tidak hanya menyangkut apa yang dibangun, tetapi juga siapa yang dihubungkan, wilayah mana yang diprioritaskan, model pembangunan apa yang dianggap sah, dan masa depan seperti apa yang hendak diwujudkan. Makalah ini menunjukkan bahwa agenda infrastruktur Indonesia saat ini bergerak dari konektivitas fisik menuju spektrum yang lebih luas, meliputi ketahanan energi, transformasi digital, adaptasi iklim, perumahan, transportasi massal, dan pembangunan ibu kota baru. Namun, makalah ini juga menegaskan bahwa imajinasi masa depan melalui infrastruktur dapat tersandung pada bias monumental, ketimpangan spasial, orientasi jangka pendek, dan lemahnya akuntabilitas. Karena itu, Indonesia memerlukan politik infrastruktur yang lebih demokratis: tidak

hanya besar dalam skala, tetapi juga adil dalam distribusi manfaat, kuat dalam legitimasi sosial, dan peka terhadap keberlanjutan ekologis.

Kata kunci: *politik infrastruktur, imajinasi pembangunan, Indonesia masa depan, konektivitas, IKN, transformasi digital, keadilan spasial*

Politik Infrastruktur dan Imajinasi tentang Indonesia Masa Depan

Pendahuluan

Dalam perencanaan pembangunan Indonesia mutakhir, infrastruktur ditempatkan bukan sebagai sektor pinggiran, melainkan sebagai fondasi transformasi nasional. Sekretariat Negara menjelaskan bahwa RPJMN 2025–2029, yang ditetapkan melalui Perpres No. 12 Tahun 2025, merupakan tahap pertama pelaksanaan RPJPN 2025–2045 sekaligus fondasi awal menuju Indonesia Emas 2045; di dalam delapan prioritas nasionalnya, pemerintah secara eksplisit menempatkan kelanjutan pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah. Pada saat yang sama, APBN 2025 mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan Belanja Pemerintah Pusat Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah Rp919,9 triliun, memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai infrastruktur selalu terkait dengan pilihan fiskal dan prioritas politik nasional. ([Setneg](#))

Namun, infrastruktur tidak pernah netral. Brian Larkin menjelaskan bahwa infrastruktur adalah bentuk-bentuk material yang memungkinkan pertukaran melintasi ruang, tempat barang, ide, limbah, daya, manusia, dan keuangan mengalir; tetapi ia juga memuat dimensi estetika, hasrat, dan janji. Dengan kata lain, infrastruktur bukan sekadar benda teknis. Ia juga

menghasilkan makna politik: menghadirkan negara, menandai kemajuan, dan membentuk perasaan kolektif tentang apa yang dianggap modern, tertinggal, strategis, atau layak diprioritaskan. ([Humanities Research Centre](#))

Karena itu, ketika Indonesia membangun pelabuhan, bendungan, jaringan 4G, kereta massal, tanggul laut, atau ibu kota baru, negara sesungguhnya sedang mengerjakan lebih dari konstruksi fisik. Negara sedang membangun narasi tentang masa depan. Antoine Picon menyebut pentingnya *social imagination* dalam memahami infrastruktur: infrastruktur lahir dari interaksi antara basis material, organisasi profesional, praktik sosioteknis, dan imajinasi sosial. Dalam pengertian ini, politik infrastruktur adalah politik tentang masa depan yang dimaterialkan. ([IDEAS/RePEc](#))

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini sangat penting karena masa depan nasional tidak dibayangkan dalam ruang hampa. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi maritim yang sangat besar; Bappenas menegaskan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan zona ekonomi eksklusif terbesar keenam di dunia, dan ekonomi lautnya menyimpan prospek bagi logistik, industri, pariwisata, serta pemanfaatan sumber daya hayati dan nonhayati laut. Artinya, imajinasi tentang Indonesia masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana infrastruktur menjembatani darat dan laut, barat dan timur, pusat dan pinggiran, metropolitan dan desa. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa politik infrastruktur di Indonesia adalah pertarungan antara beberapa imajinasi sekaligus. Ada imajinasi integrasi nasional, yang memandang infrastruktur sebagai alat pemersatu ruang kebangsaan. Ada imajinasi modernitas, yang menempatkan infrastruktur sebagai penanda kemajuan dan efisiensi. Ada imajinasi kedaulatan, yang melihatnya sebagai basis swasembada energi, pangan, air, dan data. Ada pula imajinasi keadilan, yang menuntut agar manfaat infrastruktur tidak hanya dinikmati pusat-pusat pertumbuhan lama. Di antara semua itu, pertanyaan kritisnya adalah: apakah infrastruktur benar-

benar membentuk masa depan yang inklusif, atau hanya menghasilkan lanskap baru yang tetap timpang? ([Setneg](#))

Infrastruktur sebagai Arena Politik

Secara akademik, politik infrastruktur dapat dipahami sebagai proses ketika keputusan teknis berubah menjadi keputusan publik yang sarat kepentingan. Jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan jaringan digital sering tampak sebagai objek teknokratis. Padahal, setiap proyek infrastruktur selalu mengandung pilihan tentang lokasi, pembiayaan, urutan prioritas, standar layanan, siapa yang menerima manfaat lebih dulu, dan siapa yang menanggung biaya sosial maupun ekologis. Karena itu, infrastruktur adalah bentuk nyata dari distribusi kekuasaan. ([Humanities Research Centre](#))

Dimensi politik itu semakin jelas bila kita melihat bagaimana infrastruktur dipakai untuk menyusun legitimasi pemerintahan. Infrastruktur mudah difoto, diresmikan, dan dipresentasikan sebagai bukti kerja negara. Ia memberi visualitas politik yang kuat. Tidak mengherankan bila dalam banyak konteks demokrasi elektoral, pembangunan fisik sering menjadi bahasa yang paling cepat dipahami publik. Herman dan kolega, dalam studi tentang diskursus populisme di Makassar, menunjukkan bahwa kebijakan populis kerap menekankan keuntungan jangka pendek seperti pembangunan infrastruktur cepat dan program kesejahteraan, tetapi menghadapi persoalan keberlanjutan jangka panjang, distribusi manfaat yang tidak merata, dan kurangnya transparansi penggunaan dana publik. ([IAPA Journal](#))

Temuan itu penting karena memperlihatkan sebuah paradoks. Di satu sisi, infrastruktur memang dapat memperbaiki kehidupan warga secara konkret. Di sisi lain, logika politik jangka pendek dapat mendorong pembangunan yang lebih menonjolkan kecepatan, simbol, dan popularitas daripada keberlanjutan, pemeliharaan, atau kesesuaian dengan kebutuhan jangka panjang. Politik infrastruktur, dengan demikian, selalu bergerak di antara pelayanan publik dan pertunjukan politik. ([IAPA Journal](#))

Imajinasi tentang Indonesia Masa Depan

Imajinasi masa depan dalam pembangunan Indonesia saat ini terangkum dalam bahasa resmi negara tentang transformasi. RPJMN 2025–2029 memosisikan pembangunan sebagai fondasi awal Indonesia Emas 2045, dengan kombinasi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, pembangunan wilayah dan sarana-prasarana, serta kesinambungan pembangunan. Di sini, infrastruktur tidak dibaca sebagai proyek tunggal, tetapi sebagai kerangka yang memungkinkan transformasi berlangsung. Bahasa kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa negara memandang masa depan sebagai sesuatu yang dapat direkayasa melalui investasi infrastruktur yang terarah. ([Setneg](#))

Akan tetapi, “masa depan” yang dibayangkan negara bukan satu-satunya masa depan yang mungkin. Picon menunjukkan bahwa infrastruktur selalu terkait dengan sistem representasi dan nilai yang dibagikan para pemangku kepentingan. Artinya, masa depan yang melekat pada infrastruktur adalah hasil seleksi politik. Ketika pemerintah menekankan konektivitas antarpulau, ia sedang membayangkan Indonesia sebagai jaringan yang harus dipersatukan. Ketika pemerintah menekankan kota pintar, ia sedang membayangkan Indonesia sebagai ruang yang dikendalikan oleh data dan efisiensi. Ketika pemerintah membangun tanggul laut raksasa, ia sedang membayangkan masa depan yang harus dipertahankan dari ancaman iklim. ([IDEAS/RePEc](#))

Dengan demikian, imajinasi tentang Indonesia masa depan bukan sesuatu yang abstrak. Ia hadir dalam bentuk proyek, anggaran, dan regulasi. Ia diwujudkan melalui material: beton, baja, kabel fiber optik, gardu induk, terowongan utilitas, jaringan rel, dan platform digital. Politik infrastruktur adalah cara negara mengubah imajinasi menjadi ruang yang dapat dihuni, dilalui, diawasi, dan diperebutkan. ([Humanities Research Centre](#))

Infrastruktur sebagai Bahasa Integrasi Nasional

Salah satu imajinasi paling tua dan paling kuat dalam politik infrastruktur Indonesia adalah integrasi nasional. Sebagai negara kepulauan besar, Indonesia selalu berhadapan dengan tantangan bagaimana menghubungkan wilayah-wilayah yang terpisah oleh laut, topografi, dan tingkat pembangunan yang berbeda. World Bank mencatat bahwa konektivitas fisik Indonesia telah membaik dalam beberapa tahun terakhir, dan biaya logistik turun dari 18,6 persen PDB pada 2010 menjadi 14,5 persen pada 2021. Namun laporan yang sama menegaskan bahwa logistik masih menjadi hambatan bagi perdagangan domestik, terutama di wilayah-wilayah yang kurang terintegrasi. ([World Bank](#))

Masalah itu bukan sekadar statistik ekonomi. Ia menyentuh inti keadilan spasial. Dalam halaman yang sama, World Bank menunjukkan bahwa biaya transportasi yang lebih tinggi di wilayah paling tidak terintegrasi menghambat integrasi pasar domestik dan konvergensi harga; harga berbagai barang dan jasa, termasuk obat dan LPG, konsisten lebih tinggi di Papua dan Maluku dibanding Jawa. Dengan kata lain, infrastruktur di Indonesia bukan hanya soal mempercepat arus barang, tetapi juga soal apakah warga di wilayah tertentu harus terus membayar “pajak geografi” karena negara belum sepenuhnya menghadirkan konektivitas yang adil. ([World Bank](#))

Di titik ini, politik infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari persoalan kewargaan. Warga negara secara formal setara, tetapi pengalaman sehari-harinya berbeda ketika transportasi mahal, akses pelabuhan terbatas, atau harga barang pokok lebih tinggi di wilayah tertentu. Maka, ketika negara membangun jalan, pelabuhan, bandara perintis, dan jaringan logistik, yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi ekonomi, melainkan juga bentuk konkret dari janji republik kepada seluruh wilayahnya. ([World Bank](#))

Dari Pertumbuhan ke Pemerataan: Masalah Keadilan Spasial

Meskipun narasi infrastruktur sering dibungkus dalam bahasa pemerataan, realitas pembangunan Indonesia masih menunjukkan konsentrasi ekonomi yang kuat di Jawa. BPS melaporkan bahwa selama 2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi 56,93 persen. Fakta ini penting karena memperlihatkan bahwa pembangunan fisik belum otomatis menghapus gravitasi ekonomi lama. Indonesia masa depan tidak cukup dibangun dengan lebih banyak infrastruktur; ia harus dibangun dengan infrastruktur yang benar-benar menggeser peluang, akses, dan produktivitas ke wilayah yang selama ini tertinggal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sinilah perdebatan politik infrastruktur menjadi tajam. Sebagian proyek didorong demi memperkuat simpul pertumbuhan yang sudah besar, karena secara ekonomi dampaknya cepat terlihat. Sebagian lain didorong demi membuka wilayah pinggiran yang secara komersial mungkin kurang menarik, tetapi secara kebangsaan penting. Ketegangan antara logika efisiensi dan logika pemerataan inilah yang terus mewarnai pembangunan Indonesia. Infrastruktur yang hanya mengikuti gravitasi pertumbuhan akan memperkuat pusat lama; infrastruktur yang dirancang untuk keadilan spasial menuntut keberanian politik dan kesabaran fiskal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

IKN dan Produksi Masa Depan oleh Negara

Tidak ada proyek yang lebih jelas menggambarkan relasi antara infrastruktur dan imajinasi masa depan Indonesia dibanding Ibu Kota Nusantara. Otorita IKN menggambarkan Nusantara sebagai kota modern yang tangguh, efisien, dan ramah lingkungan, dibangun melalui teknologi cerdas, transportasi berkelanjutan, dan infrastruktur hijau. Dalam narasi resmi ini, IKN bukan hanya pemindahan pusat administrasi, tetapi model kota masa depan yang hendak merepresentasikan Indonesia baru. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Dokumen resmi Otorita IKN pada 2025 menegaskan bahwa RPJMN 2025–2029 mempercepat pembangunan IKN dan menargetkan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Dalam keterangan yang sama, Otorita IKN menyebut Presiden telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun. Pada Juli 2025, Otorita IKN juga menyampaikan kebutuhan anggaran 2026 sebesar Rp21,1 triliun untuk kelanjutan tahap kedua, terutama pembangunan perkantoran dan hunian lembaga legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Lebih jauh lagi, Otorita IKN menyatakan telah menerima komitmen investasi Rp225,02 triliun, terdiri atas investasi swasta murni dan skema KPBU. Di sini terlihat jelas bagaimana politik infrastruktur bekerja: IKN adalah proyek spasial, fiskal, simbolik, dan ideologis sekaligus. Ia memproyeksikan masa depan Indonesia sebagai negara yang lebih seimbang secara kewilayahan, lebih modern secara perkotaan, dan lebih berani memindahkan pusat gravitasi kebangsaannya. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Tetapi justru karena itulah IKN juga menjadi arena kritik. Semakin besar janji yang dilekatkan pada sebuah proyek, semakin tinggi pula standar legitimasi yang harus dipenuhi. Pertanyaan tentang pembiayaan, prioritas, manfaat sosial, keberlanjutan ekologis, dan konsistensi jangka panjang tidak bisa dihindari. IKN memperlihatkan bahwa infrastruktur masa depan tidak pernah hanya dinilai dari kemegahannya, tetapi dari apakah ia mampu menjawab kebutuhan bangsa secara meyakinkan. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Infrastruktur Iklim dan Imajinasi Bertahan

Selain modernitas dan pemerataan, politik infrastruktur Indonesia kini juga makin kuat dibentuk oleh imajinasi tentang bertahan dari krisis iklim. Contoh paling jelas adalah Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa. Sekretariat Negara mencatat bahwa Presiden Prabowo pada Juni 2025 menegaskan komitmen untuk segera memulai proyek tanggul laut sebagai salah satu

infrastruktur paling vital demi melindungi pantai utara Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem. Proyek ini direncanakan membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, dengan estimasi biaya total sekitar 80 miliar dolar AS. ([Setneg](#))

Proyek semacam ini memperlihatkan perubahan penting dalam imajinasi pembangunan. Bila dulu infrastruktur sering dibayangkan terutama sebagai alat pertumbuhan, kini ia juga dibayangkan sebagai alat perlindungan, adaptasi, dan daya tahan. Indonesia masa depan bukan hanya negara yang terhubung, tetapi juga negara yang harus bertahan terhadap ancaman ekologis. Politik infrastruktur pun bergeser: dari semata akselerasi ke mitigasi; dari membuka ruang baru pertumbuhan ke mempertahankan ruang hidup yang terancam. ([Setneg](#))

Namun, infrastruktur iklim berskala raksasa juga memunculkan pertanyaan yang sama dengan megaprojek lain: siapa yang dilindungi lebih dulu, siapa yang menanggung biaya, bagaimana koordinasi pusat-daerah diatur, dan apakah solusi teknis raksasa akan diiringi pembenahan tata ruang, pengelolaan air, dan perubahan perilaku pembangunan. Dengan demikian, tanggul laut bukan hanya proyek teknik, tetapi cermin dari bagaimana negara mendefinisikan risiko dan masa depan. ([Setneg](#))

Infrastruktur Energi dan Imajinasi Kedaulatan

Imajinasi masa depan Indonesia juga semakin terkait dengan kedaulatan energi. Pada Januari 2025, Presiden meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit dengan kapasitas total 3,2 gigawatt, serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Sekretariat Negara menegaskan bahwa infrastruktur tersebut diposisikan sebagai landasan penting bagi transformasi ekonomi menuju negara industri. ([Setneg](#))

Ini menunjukkan bahwa infrastruktur energi di Indonesia tidak dibaca sekadar sebagai soal pasokan listrik. Ia juga menjadi bahasa politik tentang

kemajuan industri, pengurangan kemiskinan, dan kemandirian nasional. Ketika negara berbicara tentang swasembada energi, jaringan transmisi, pembangkit, dan gardu induk berubah dari aset utilitas menjadi simbol kemampuan bangsa mengatur nasib ekonominya sendiri. Infrastruktur, dalam konteks ini, adalah materialisasi kedaulatan. ([Setneg](#))

Tetapi kedaulatan energi juga mengandung tantangan konseptual. Infrastruktur energi yang besar harus dibaca bersama pertanyaan tentang transisi energi, keberlanjutan, dan distribusi manfaat. Bila masa depan energi Indonesia hanya diletakkan pada ekspansi kapasitas, tanpa perhatian cukup pada kualitas transisi dan keadilan distribusi, maka yang terwujud adalah kedaulatan yang parsial. Politik infrastruktur energi harus mampu menyatukan pasokan, akses, efisiensi, dan keberlanjutan. ([Setneg](#))

Infrastruktur Digital dan Masa Depan yang Terkoneksi

Salah satu pergeseran paling penting dalam politik infrastruktur Indonesia ialah menguatnya infrastruktur digital sebagai fondasi masa depan. Hal ini terlihat jelas dalam diskursus resmi pemerintah. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menyatakan bahwa ekonomi digital Indonesia telah mencapai USD90 miliar pada 2024, tetapi kesenjangan infrastruktur masih menjadi hambatan bagi pertumbuhan yang inklusif. Sumber yang sama mencatat bahwa penetrasi internet di daerah pedesaan masih di bawah 50 persen, sedangkan di wilayah perkotaan sudah melampaui 80 persen. Bahkan, meskipun jaringan 4G disebut telah mencakup lebih dari 90 persen populasi, pemerintah masih menemukan fenomena "4G rasa 2G" akibat keterbatasan fiber optik sebagai *backbone* konektivitas berkualitas. ([Infradigital](#))

Temuan tersebut sangat penting untuk membaca Indonesia masa depan. Di satu sisi, masa depan ekonomi, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan keuangan semakin digital. Di sisi lain, tanpa infrastruktur digital yang merata dan bermutu, transformasi itu akan memperlebar jurang antara pusat dan pinggiran, kota dan desa, kelompok terhubung dan kelompok

tertinggal. Karena itu, politik infrastruktur digital sesungguhnya adalah politik kewargaan digital. Siapa yang memiliki akses cepat, stabil, dan terjangkau akan lebih siap memasuki ekonomi dan negara masa depan dibanding mereka yang hanya memiliki akses nominal. ([Infradigital](#))

Program Kampung Internet 2025 memberi ilustrasi yang menarik. Kemkomdigi menyebut program ini sebagai bukti kehadiran negara hingga pelosok desa, dengan jangkauan 1.194 titik di 20 desa pada 9 kabupaten di 5 provinsi, sekaligus penambahan jaringan fiber optik sepanjang 196 kilometer. Pemerintah juga mengaitkannya dengan target RPJMN: cakupan *fixed broadband* rumah tangga meningkat dari sekitar 21 persen saat ini menjadi 50 persen pada 2029, jaringan fiber optik menjangkau 90 persen kecamatan, dan kecepatan layanan ditingkatkan hingga 100 Mbps. Selain itu, halaman resmi infrastruktur digital pemerintah menyebut proyek konektivitas nasional akan melayani sekitar 37.000 titik layanan publik, termasuk sekolah, pesantren, puskesmas, fasilitas kesehatan, kantor pemerintah, dan layanan pertahanan-keamanan. ([Infradigital](#))

Dalam perspektif politik infrastruktur, data tersebut memperlihatkan perubahan penting: masa depan Indonesia tidak lagi bisa dibayangkan hanya melalui jalan dan pelabuhan. Serat optik, *backhaul*, spektrum, pusat data, dan akses internet desa kini sama strategisnya dengan jalan tol dan bandara. Infrastruktur digital telah menjadi arena baru perebutan pemerataan, daya saing, dan kedaulatan teknologi. ([Infradigital](#))

Infrastruktur Sosial: Rumah, Sekolah, dan Layanan Dasar

Bila politik infrastruktur hanya dipahami sebagai megaprojek, kita akan kehilangan lapisan yang sangat penting: infrastruktur sosial. Dokumen Kemenkeu tentang realisasi 2025 menunjukkan bahwa ekosistem infrastruktur juga mencakup FLPP Rp24,8 triliun untuk sekitar 192,7 ribu rumah, revitalisasi sekolah Rp12,2 triliun untuk 11.600 sekolah, pembangunan dan preservasi jalan Rp14,7 triliun, serta infrastruktur listrik perdesaan Rp3,6 triliun di 36 provinsi. Data ini menunjukkan bahwa

infrastruktur masa depan bukan hanya tentang landmark besar, tetapi juga tentang rumah layak, sekolah fungsional, akses jalan, dan listrik desa.

([Kemenkeu Media](#))

Pandangan ini penting secara normatif. Infrastruktur yang paling menentukan kualitas hidup warga sering kali bukan proyek yang paling spektakuler, melainkan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Rumah yang layak, sekolah yang aman, listrik yang stabil, dan jalan yang bisa dilalui sepanjang tahun adalah bentuk paling nyata dari hadirnya negara. Bila imajinasi tentang Indonesia masa depan terlalu terkonsentrasi pada proyek monumental, maka kita berisiko melupakan bahwa masa depan juga dibentuk oleh kualitas layanan dasar yang tampak biasa tetapi sangat menentukan martabat warga. ([Kemenkeu Media](#))

Transportasi Massal dan Imajinasi Kota Modern

Politik infrastruktur juga membentuk imajinasi tentang kota Indonesia yang diinginkan. Peresmian Stasiun Tanah Abang Baru pada November 2025 memperlihatkan bagaimana transportasi massal dibingkai sebagai simbol modernisasi dan produktivitas. Sekretariat Negara mencatat pemerintah menempatkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau sebagai hak warga negara dan fondasi penting produktivitas serta pemerataan ekonomi. Menhub juga melaporkan bahwa kapasitas Stasiun Tanah Abang meningkat dari sekitar 141 ribu menjadi 380 ribu penumpang. ([Setneg](#))

Di sini, infrastruktur kota bukan hanya soal mobilitas. Ia menjadi bagian dari narasi tentang masyarakat modern: lebih tertib, lebih efisien, lebih terhubung antarmoda, dan lebih ramah produktivitas. Infrastruktur transportasi massal juga memperlihatkan bahwa masa depan Indonesia tidak selalu harus dibayangkan dalam bentuk ekspansi horizontal dan kendaraan pribadi; ia dapat dibayangkan sebagai kota yang lebih kolektif, lebih padat, dan lebih terintegrasi. ([Setneg](#))

Namun, lagi-lagi, pertanyaan politiknya tetap sama: apakah modernisasi transportasi hanya dinikmati kawasan metropolitan utama, atau dapat direplikasi dalam bentuk yang sesuai bagi kota-kota lain? Bila modernitas perkotaan hanya terkonsentrasi di sedikit simpul, maka infrastruktur justru memproduksi hierarki baru dalam pengalaman kewargaan urban. ([Setneg](#))

Bahaya Monumentalisme dan Orientasi Cepat

Salah satu risiko utama dalam politik infrastruktur adalah monumentalisme: kecenderungan menilai keberhasilan terutama dari skala, visibilitas, dan simbolisme proyek. Dalam konteks ini, proyek-proyek besar memang dapat memberi sinyal kuat tentang kapasitas negara dan kepercayaan diri nasional. Namun jika orientasi politik terlalu berat pada proyek yang mudah diresmikan, maka aspek pemeliharaan, kualitas institusi, distribusi manfaat, dan evaluasi sosial dapat terpinggirkan. Temuan studi tentang Makassar sangat relevan: kebijakan populis yang menonjolkan infrastruktur cepat dan proyek simbolik kerap menghadapi persoalan keberlanjutan, transparansi, dan distribusi manfaat. ([IAPA Journal](#))

Dari sudut pandang pembangunan jangka panjang, hal ini penting. Infrastruktur yang baik tidak hanya harus selesai dibangun; ia harus terawat, digunakan secara produktif, terhubung dengan sistem lain, serta diterima secara sosial. Dalam logika politik jangka pendek, insentif untuk memelihara sering lebih lemah daripada insentif untuk meresmikan. Karena itu, Indonesia masa depan memerlukan politik infrastruktur yang menghargai umur panjang sistem, bukan hanya momentum inaugurasi. ([IAPA Journal](#))

Infrastruktur, Demokrasi, dan Akuntabilitas

Karena melibatkan anggaran besar dan janji publik yang luas, infrastruktur juga menuntut kualitas demokrasi yang tinggi. APBN 2025 menunjukkan skala besar belanja publik dan transfer ke daerah, yang berarti keputusan infrastruktur bukan hanya urusan kementerian teknis, tetapi juga urusan

tata kelola fiskal dan akuntabilitas politik. Di titik ini, kualitas masa depan Indonesia bukan cuma ditentukan oleh seberapa banyak proyek dibangun, tetapi oleh apakah proses penentuan prioritas, pembiayaan, dan evaluasinya berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. ([Kemenkeu Media](#))

Akuntabilitas ini makin penting ketika proyek infrastruktur memuat narasi besar: Indonesia Emas, kota dunia, pusat pemerintahan baru, swasembada energi, atau perlindungan iklim. Narasi besar dapat memobilisasi dukungan dan optimisme, tetapi juga dapat menekan kritik jika tidak diimbangi ruang deliberasi yang sehat. Politik infrastruktur yang dewasa bukanlah politik yang menolak visi besar, melainkan politik yang berani menguji visi besar itu dengan pertanyaan publik yang kritis: siapa yang diuntungkan, siapa yang tertinggal, apa risikonya, dan bagaimana ukuran keberhasilannya. ([Setneg](#))

Menuju Imajinasi Infrastruktur yang Lebih Dewasa

Berdasarkan pembahasan di atas, Indonesia memerlukan pergeseran dari politik infrastruktur yang sekadar monumental menuju politik infrastruktur yang bersifat relasional, sosial, dan ekologis. Relasional berarti setiap proyek harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang lebih luas: jalan terhubung ke logistik, pelabuhan ke industri lokal, fiber optik ke layanan publik, pembangkit ke kualitas distribusi, perumahan ke transportasi, dan tanggul laut ke tata ruang wilayah. Infrastruktur tidak boleh dipahami sebagai benda yang berdiri sendiri. ([Humanities Research Centre](#))

Sosial berarti keberhasilan infrastruktur harus diukur dari perubahan riil dalam kualitas hidup warga: biaya logistik yang turun, harga barang yang lebih setara antardaerah, rumah yang lebih layak, sekolah yang lebih aman, internet desa yang lebih cepat, dan mobilitas yang lebih mudah. Dalam kerangka ini, proyek kecil yang menyelesaikan persoalan mendasar warga bisa jadi lebih transformatif daripada proyek raksasa yang megah tetapi lemah dalam distribusi manfaat. ([World Bank](#))

Ekologis berarti masa depan Indonesia tidak bisa lagi dibangun dengan memisahkan infrastruktur dari krisis iklim dan daya dukung alam. Giant Sea Wall menunjukkan bagaimana adaptasi iklim mulai masuk ke jantung politik infrastruktur. Tetapi pendekatan ekologis menuntut lebih dari megaprojek protektif; ia memerlukan desain pembangunan yang memperhitungkan risiko, resiliensi, air, pesisir, energi, dan keberlanjutan lintas-generasi. ([Setneg](#))

Akhirnya, politik infrastruktur yang lebih dewasa harus berani menggabungkan empat horizon sekaligus: integrasi nasional, keadilan spasial, kedaulatan teknologi-energi, dan kesejahteraan sehari-hari warga. Indonesia masa depan tidak cukup dibayangkan sebagai negeri dengan proyek besar. Ia harus dibayangkan sebagai masyarakat yang lebih terhubung tanpa makin timpang, lebih modern tanpa meninggalkan desa, lebih digital tanpa memperlebar eksklusif, dan lebih kuat tanpa mengabaikan keberlanjutan. ([Setneg](#))

Penutup

Politik infrastruktur di Indonesia pada dasarnya adalah politik tentang bagaimana masa depan dibayangkan, dibenarkan, dibiayai, dan dimaterialkan. Dari RPJMN 2025–2029 hingga APBN 2025, dari IKN hingga Giant Sea Wall, dari proyek listrik strategis hingga Kampung Internet, negara sedang menulis masa depan melalui infrastruktur. Masa depan itu dibingkai dalam kata-kata seperti Indonesia Emas, modernitas, konektivitas, swasembada, pemerataan, dan transformasi. ([Setneg](#))

Tetapi makalah ini menunjukkan bahwa imajinasi masa depan melalui infrastruktur selalu bersifat politis. Ia dapat menyatukan, tetapi juga mengecualikan. Ia dapat pemeratakan, tetapi juga menebalkan hierarki lama. Ia dapat membangun harapan, tetapi juga berubah menjadi simbolisme yang terlalu cepat puas pada visual kemajuan. Karena itu, infrastruktur harus dibaca bukan sekadar dari besar anggarannya atau megah bentuknya, melainkan dari apakah ia benar-benar memperluas

keadilan, menurunkan ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat kapasitas bangsa menghadapi masa depan. ([World Bank](#))

Dengan demikian, pertanyaan utama tentang Indonesia masa depan bukan hanya “infrastruktur apa yang akan dibangun”, tetapi “masa depan siapa yang sedang dibangun melalui infrastruktur itu.” Di situlah inti politik infrastruktur: bukan pada beton semata, melainkan pada visi kebangsaan yang dipilih dan pada keberanian untuk memastikan bahwa visi itu sungguh milik seluruh Indonesia. ([Humanities Research Centre](#))

Glosarium

Politik infrastruktur: proses ketika keputusan tentang pembangunan, lokasi, pembiayaan, dan fungsi infrastruktur menjadi bagian dari distribusi kekuasaan dan prioritas publik.

Imajinasi infrastruktur: cara kolektif membayangkan masa depan melalui proyek dan sistem material seperti jalan, listrik, data, air, atau transportasi.

Keadilan spasial: prinsip bahwa manfaat pembangunan harus tersebar lebih adil antarwilayah, bukan terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan lama.

IKN: Ibu Kota Nusantara, proyek pembangunan ibu kota baru yang dibingkai sebagai kota masa depan Indonesia.

Infrastruktur sosial: infrastruktur yang langsung menopang kualitas hidup, seperti perumahan, sekolah, fasilitas kesehatan, listrik desa, dan layanan publik dasar.

Infrastruktur digital: jaringan dan sistem yang menopang konektivitas, data, dan komunikasi, seperti fiber optik, BTS, backhaul, pusat data, dan akses internet publik.

Kedaulatan energi: kemampuan negara memenuhi kebutuhan energinya dengan basis infrastruktur dan sistem pasokan yang kuat serta berkelanjutan.

Resiliensi iklim: kemampuan sistem sosial dan material untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari ancaman perubahan iklim.

Monumentalisme: kecenderungan pembangunan yang terlalu menekankan skala, simbol, dan visibilitas proyek, kadang dengan mengorbankan dimensi sosial dan keberlanjutan.

Transformasi nasional: perubahan terarah dalam struktur ekonomi, sosial, spasial, digital, dan kelembagaan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia* (Edisi 2).

Herman, Aslinda, Purna, Z. A., Didin, & Rizal MI, S. (2024). "Makassar World City": Regional development orientation in the discourse of populism. AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference Proceedings.

<https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1130>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Informasi APBN Tahun Anggaran 2025*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Oktober). *Konferensi pers APBN Kita: Realisasi hingga 30 September 2025*.

Kementerian Komunikasi dan Digital. (n.d.). *Infrastruktur digital*.

Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. (2025, 25 Februari). *Kolaborasi Ditjen Infrastruktur Digital & AFTECH: Luncurkan riset strategis pemerataan teknologi fintech Indonesia*.

Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. (2025, 30 September). *Kemkomdigi luncurkan Program Kampung Internet 2025*.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, 7 Maret). *RPJMN 2025–2029: Fondasi awal wujudkan visi Indonesia Emas 2045*.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, 20 Januari). *Indonesia menuju kemandirian energi, Presiden Prabowo resmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan*.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, 12 Juni). *Presiden Prabowo tegaskan komitmen pembangunan Proyek Strategis Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa*.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, 4 November). *Presiden Prabowo resmikan Stasiun Tanah Abang Baru, simbol modernisasi transportasi publik Jakarta*.

Larkin, B. (2013). The politics and poetics of infrastructure. *Annual Review of Anthropology*, 42, 327–343. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092412-155522>

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2025, 8 Juli). *Rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI: Otorita IKN paparkan rencana anggaran 2026*.

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2025, 28 Oktober). *Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo: Pembangunan IKN maju tanpa ragu.*

Picon, A. (2018). Urban infrastructure, imagination and politics: From the networked metropolis to the smart city. *International Journal of Urban and Regional Research*, 42(2), 263–275. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12527>

World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: December 2023.*

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 6 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))
<https://chatgpt.com/c/69d37f65-3640-839d-822b-a5e109ffd3e1>